Biro Keuangan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

CAPAIAN KINERJA TW III
BIRO KEUANGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama semua pihak.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggungjawab akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Keuangan atas penggunaan anggaran dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 2024.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Biro Keuangan Tahun 2024 memuat gambaran kinerja Biro Keuangan yang mencakup uraian tugas pokok dan fungsi organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis setiap capaian sasaran strategis yang diformulasikan secara obyektif, sistematis dan terukur.

Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Biro Keuangan Tahun 2024 dapat memberikan indikator pencapaian hasil manfaat dan kegiatan yang berhasil guna dan berdayaguna bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta, 15 Oktober 2024

Kepala Biro Keuangan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR TABEL **4**

DAFTAR GAMBAR **5**

BAB I PENDAHULUAN **6**

A. LATAR BELAKANG 6

B. MAKSUD DAN TUJUAN 6

C. TUGAS DAN FUNGSI BIRO KEUANGAN 7

D. STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN 8

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 8

1. Kontribusi BIRO KEUANGAN Pada Target Kinerja Level Kementerian Perhubungan Tahun 2024 9

2. Target Kinerja BIRO KEUANGAN Tahun 2024 10

BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 ..... **11**

A. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 11

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel (Level Kementerian) 10

Sasaran Program : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel (Level Biro Keuangan)

IKK: Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan 10

2. Sasaran Program : Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan
IKK: Opini BPK 11

3. Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
IKK: Indeks reformasi hukum Kementerian Perhubungan Bidang Keuangan .. 12

IKK: Indeks kualitas kebijakan bidang keuangan 13

4. Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan
IKK: Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan.....15

5. Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan
IKK: Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan 17

6. Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perkantoran Biro Keuangan
IKK: Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran 18

7. Sasaran Program : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Keuangan
IKK: Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan.....20
IKK: Indeks Tata Kelola Manajemen SDM Biro Keuangan 21

B. LAPORAN CAPAIAN KINERJA PADA APLIKASI 22

1. Aplikasi e-Peformance Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Kementerian Perhubungan (epeformance.dephub.go.id) 22

2. Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan (smart.kemenkeu.go.id) 23

3. Aplikasi Capaian Output dalam Sistem Aplikasi Satker (SAS).....24

BAB IIII PENUTUP **27**

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Kontribusi Biro Keuangan dalam Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2024 8

Tabel 1-2 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Pengelolaan Kementerian Perhubungan Level Kementerian Perhubungan Tahun 2024 10

Tabel 1-3 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Pengelolaan Kementerian Perhubungan Level Biro Keuangan Tahun 2024 10

Tabel 1-4 Realisasi Anggaran Triwulan III Kegiatan Monitoring Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan 11

Tabel 1-5 Capaian Kinerja Triwulan III Opini BPK 12

Tabel 1-6 Realisasi Anggaran Triwulan III Kegiatan Pengelolaan Laporan Keuangan 12

Tabel 1-7 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Reformasi Hukum 12

Tabel 1-8 Realisasi Anggaran Triwulan III Kegiatan Reformasi Hukum 17

Tabel 1-9 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perhubungan 17

Tabel 1-10 Realisasi Anggaran Triwulan III Kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Keuangan 18

Tabel 1-11 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan 18

Tabel 1-12 Realisasi Anggaran Triwulan III 20

Tabel 1-13 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan 21

Tabel 1-14 Realisasi Anggaran Triwulan III 21

Tabel 1-15 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran 22

Tabel 1-16 Realisasi Anggaran Triwulan III 19

Tabel 1-17 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan 23

Tabel 1-18 Realisasi Anggaran Triwulan III 24

Tabel 1-19 Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Tata Kelola Manajemen SDM Biro Keuangan . 24

Tabel 1-20 Realisasi Anggaran Triwulan III 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Status Pengumpulan Data Aplikasi e-Peformance Kementerian Perhubungan 22

Gambar 2-2 Status Capaian Kinerja Unit Eselon III Aplikasi e-Peformance Kementerian Perhubungan..... 22

Gambar 2-4 Nilai Kinerja Triwulan III Aplikasi SMART Kementerian Keuangan..... 23

Gambar 2-5 Capaian Output dalam Aplikasi Satker (SAS) Perhubungan 23

Gambar 2-6 Indikator Pelaksanaan Anggaran Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)..... 24

Gambar 2-7 Realisasi Anggaran Aplikasi E-Monitoring dan Reporting Kementerian Perhubungan 24

Gambar 2-8 Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Perhubungan 25

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu salah satu azas dalam penyelenggaraan negara yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas keterbukaan, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah yang merupakan kewajiban setiap institusi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta khususnya pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing institusi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahwa Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja Eselon III disusun dan ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah periode pelaporan triwulan pada Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian KinerjaTriwulan III Biro Keuangan Tahun 2024 adalah dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Biro Keuangan yang merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Biro Keuangan Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2022 dan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebagai upaya melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara, tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

D. STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN

Struktur organisasi Biro Keuangan terdiri dari 4 (empat) bagian dan 14 (empat belas) Ketua Tim, secara detail digambarkan pada Gambar berikut:

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2		3	4	5
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 1	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2
SK 2	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan	IKK 2	Opini BPK	Opini	WTP
SK 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKK 3	Indeks reformasi hukum Kementerian Perhubungan Bidang Keuangan	Nilai	74
		IKK 4	Indeks kualitas kebijakan bidang keuangan	Nilai	72
SK 4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	IKK 5	Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
SK 5	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	IKK 6	Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perkantoran Biro Keuangan	IKK 7	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	94,5
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Keuangan	IKK 8	Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan	Nilai	70
		IKK 9	Indeks Tata Kelola Manajemen SDM Biro Keuangan	Nilai	70

Kegiatan	Anggaran
1. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 2.638.649.000,-
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 1.275.000.000,-
3. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 15.151.017.000,-

Disetujui,
Sekretaris Jenderal

NOVIE RIYANTO

Manado, 6 Januari 2024
Kepala Biro Keuangan

AGUSTINA DANI ENDAHNATI

1. KONTRIBUSI BIRO KEUANGAN PADA TARGET KINERJA LEVEL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Dalam kaitannya dengan capaian kinerja IKU Kementerian Perhubungan, bahwa terdapat IKU Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Kontribusi Biro Keuangan dalam Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2024

	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARANKEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SS	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2

2. TARGET KINERJA BIRO KEUANGAN TAHUN 2024

Sesuai tugas, fungsi, wewenang dan pendelegasian kinerja, telah disusun matriks target kinerja Biro Keuangan Tahun 2020 - 2024 sesuai Sasaran Strategis (SS) *"Tercapainya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan Penilaian WTP"* dengan penjelasan sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARANKEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	**Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel**	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2
2	**Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan**	Opini BPK	Opini	WTP
3	**Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum**	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan bidang Keuangan	Nilai	74
		Indeks Kualitas Kebijakan bidang Keuangan	Nilai	72
4	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian perhubungan**	Kualitas Pengelolaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
5	**Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan**	Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Nilai	90
6	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Biro Keuangan**	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	94,5
7	**Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Keuangan**	Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan	Nilai	70
		Indeks Tata Kelola Manajemen SDM Biro Keuangan	Nilai	70

BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Pengelolaan Kementerian Perhubungan
IKU Level Biro Keuangan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2	74,66	82,75

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan pada Triwulan III hingga posisi 30 September 2024 yaitu dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai sebesar 92,67 sedangkan dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) tercapai sebesar 56,64. Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari 50% IKPA dan 50% EKA sehingga hasil akhir Indeks Pengelolaan Kementerian Perhubungan diperoleh sebesar 74,66.

b. Rencana Tindaklanjut

a) Memperhatikan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Angggaran TA. 2024 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023;
b) Memperhatikan Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2024;
c) Memprioritaskan dan mengawal penyeselesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020 – 2024;
d) Mereviu rencana kegiatan secara periodik, prognosa, serta menyusun RPD masing-masing belanja;
e) Melakukan realokasi anggaran terhadap sisa kontrak untuk kegiatan;
f) Berkoordinasi dengan KPPN setempat terhadap tagihan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang memerlukan Renkas;
g) Berkoordinasi dengan KPPN untuk menghindari kesalahan pengajuan pencairan/SPM;
h) Disiplin dalam melakukan input data terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk memaksimalkan nilai IKPA.

c. Realisasi Anggaran

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Triwulan III
Kegiatan Monitoring Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	2.900.310.000	2.007.919.167	69,23

2. Sasaran Program: Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan

Tabel 1.5
Capaian Kinerja Triwulan III Opini BPK

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP

a. Pencapaian Opini WTP Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang harus memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:
   1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
   2. Kecukupan Pengungkapan;
   3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
   4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

b. Rencana Tindak Lanjut
   Adapun rencana tindak lanjut dalam mempertahankan Opini BPK WTP dan meningkatkan kinerja yakni sebagai berikut:
   1) Menyusun Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan periode Tahun 2023 per Triwulan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta menyampaikannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, akurat, dan sesuai dengan kriteria penentuan opini WTP yakni: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern;
   2) Meningkatkan koordinasi dengan Eselon I dan/atau unit kerja terkait dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi saat penyusunan laporan keuangan;
   3) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam penyusunan Laporan Keuangan;
   4) Menerapkan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan Berkerjasama dengan APIP dalam pelaksanaan reviu dan tindak lanjut temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

c. Realisasi Anggaran

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran Triwulan III
Kegiatan Pengelolaan Laporan Keuangan

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Pengelolaan Laporan Keuangan	1.656.901.000	940.835.676	56,78

3. Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum

1) Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan Bidang Keuangan

Tabel 1.7
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Reformasi Hukum
Kementerian Perhubungan bidang Keuangan

SASARAN STRATEGIS (SP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan Bidang Keuangan	%	76	85,3	112

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

b. Realisasi Anggaran

Tabel 1.8
Realisasi Anggaran Triwulan III Kegiatan Reformasi Hukum

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Kualitas dan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	7.158.506.000	5.472.773.595	76,45

2) Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Keuangan

Tabel 1.9
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perhubungan bidang Keuangan

SASARAN STRATEGIS (SP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Keuangan	%	72	50,67	70,37

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

No	Aspek	Bobot	Capaian TW III
1	Agenda Setting atau usulan	24	10
2	Formulasi kebijakan atau telaah dokumen	36	10
3	Implementasi Kebijakan	24	6
4	Evaluasi Kebijakan	16	6
	Total	**100**	**32**

Terdapat usulan deregulasi kebijakan terhadap PM 20 Tahun 2016 (posisi saat ini masih proses penelaahan draf di Biro Hukum);

b. Rencana Tindaklanjut

Terhadap deregulasi kebijakan akan terus dimonitor sampai dengan selesai.

c. Realisasi Anggaran

Tabel 1.10
Realisasi Anggaran Triwulan III
Kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Keuangan

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Keuangan	251.674.000	127.520.000	50,67

4. Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan

Tabel 1.11
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan

SASARAN STRATEGIS (SP)	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	48,94	57,84

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

No	Aspek	Bobot	Capaian TW III	Jumlah
1	% Realisasi pelaksanaan anggaran	20%	55,39	11,08
2	% Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	20%	100	20
3	% Ketepatan waktu penyampaian RENSTRA, PK dan LKIP	20%	100	20
4	% Realisasi PNBP Ke menhub	20%	54,95	10,99
5	Tingkat maturitas aspek keuangan BLU Kemenhub	20%	0	0
	Total	**100%**	**259,23**	**57,84**

1) Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan III sebesar Rp25.102.408.317.660,- atau mencapai 55,39% terhadap pagu anggaran sebesar Rp45.320.487.716.000,-

2) Terhadap aspek ketepatan waktu penyampaian RENSTRA, PK dan LAKIP, pencapaian kinerja sebesar 100% karena telah menyampaikan seluruh dokumen tepat waktu.

3) Indeks kinerja Tingkat Maturitas Aspek Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Keuangan BLU. Perhitungan rasio yang terdapat pada masing-masing-masing indikator akan menggunakan laporan keuangan Badan Layanan Umum periode penilaian dan 2 tahun kebelakang. Adapun indikator yang diukur aspek keuangan tingkat maturitas Badan Layanan Umum terdiri dari Likuiditas, Efisiensi, Efektivitas, dan Tingkat Kemandirian. Penilaian realisasi indeks kinerja tingkat maturitas aspek keuangan BLU dilaksanakan sesuai dengan Per-11 PB 2021 tentang Pedoman Matrat BLU. Untuk penilaian *maturity rating* tahun 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

b. Rencana Tindaklanjut IKU:

1) Rencana tindak lanjut Pelaksanaan Anggaran:
   - Memperhatikan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Angggaran TA. 2024 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023;
   - Memperhatikan Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2024;
   - Memprioritaskan dan mengawal penyeselesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020 – 2024;
   - Mereviu rencana kegiatan secara periodik, prognosa, serta menyusun RPD masing-masing belanja;
   - Melakukan realokasi anggaran terhadap sisa kontrak untuk kegiatan;
   - Berkoordinasi dengan KPPN setempat terhadap tagihan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang memerlukan Renkas;
   - Berkoordinasi dengan KPPN untuk menghindari kesalahan pengajuan pencairan/SPM;
   - Disiplin dalam melakukan input data terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk memaksimalkan nilai IKPA.
2) Dokumen RENSTRA, PK dan LAKIP yang telah disampaikan menjadi dasar bagi penilaian atas pelaksanaan program kerja Biro Keuangan sekaligus menjadi dasar untuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
3) Adapun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja IKK Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan sasaran strategis Persentase Realisasi PNBP Kementerian Perhubungan yakni:
   - Penyesuaian regulasi terkait pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui revisi PM 20 Tahun 2016;
   - Mendorong perbaikan tata Kelola PNBP pada masing-masing unit Es I;
   - Mendorong peningkatan tata Kelola dengan sistem teknologi informasi;
   - Mendorong unit Eselon I untuk melakukan Kerjasama dengan Badan usaha dalam rangka optimalisasi layanan dan aset;
   - Mendorong optimalisasi atas pemafaatan BMN pada masing-masing unit Eselon I;
   - Meningkatkan Pengelolaan Piutang di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
   - Melakukan evaluasi terhadap besaran tarif layanan PNBP lainnya;
   - Meningkatkan monitoring PNBP.
4) Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja IKK Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan sasaran strategis Persentase Realisasi Belanja yang bersumber dari PNBP Kementerian Perhubungan yakni:
   - Meningkatkan kualitas perencanaan belanja yang bersumber dari PNBP;
   - Meningkatkan perencanaan yang akurat dalam penyerapan yang optimal;
   - Meningkatkan monitoring dan evaluasi Pagu PNBP dan realisasi belanja yang bersumber dari PNBP/BLU;
   - Meningkatkan monitoring dan evaluasi Pagu PNBP dan realisasi belanja yang bersumber dari Pemanfaatan Aset;
   - Memastikan kesesuaian belanja yang dilakukan dengan realisasi pendapatan dan Maksimun Pencairan (MP).

5) Adapun rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan penilaian tingkat maturitas aspek keuangan BLU adalah dengan melakukan monitoring atas penilaian tingkat maturitas BLU secara mandiri (*self-assessment*) pada aplikasi BIOS sampai dengan akhir semester I 2024, setelah itu akan dilaksanakan reviu terhadap penilaian tingkat maturitas bersama dengan Tim Direktorat PK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

c. Realisasi Anggaran

Tabel 1.12
Realisasi Anggaran Triwulan III

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Monitoring Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan:	8.767.200.000	3.801.903.433	43,36
- Penyusunan Laporan keuangan	1.759.064.000	1.100.009.361	62,53
- Monitoring pelaksana anggaran	2.600.310.000	1.102.497.136	42,40
- Pengelolaan satker BLU	954.844.000	911.237.364	95,43
- Laporan RENSTRA, PK, LKIP	954.844.000	787.702.436	82,50
- Laporan PNBP	2.600.301.000	1.652.120.729	64,78

5. Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan

Tabel 1.13
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Indeks Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90	76.53	85.03

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Capaian Kinerja pada IKK Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan sudah mencapai 50% karena telah dilakukan penyusunan Berita Acara Penetapan Akun Signifikan, Satker Sampling, dan Materialitas, serta telah dilakukan penyusunan dan distribusi *Risk Control Matrix* (RCM) akun signifikan kepada seluruh satker *sampling*.

Berikut perhitungan realisasi kinerja IKK Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan :

$$\%PIPK = \frac{584}{584} \times 100\% = 100\%$$

b. Rencana Tindaklanjut

Mengonsolidasikan hasil penilaian PIPK secara berjenjang dari Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA dan Tim Penilai PIPK Tingkat UAPPA-E1 oleh Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA, Realisasi Anggaran

Tabel 1.14
Realisasi Anggaran Triwulan III

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Pengendalian Intern atas Pelaporan KeuanganPengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	569.817.000	436,070,546	76,53%

6. Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Biro Keuangan

Tabel 1.15
Capaian Kinerja Triwulan III Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Biro Keuangan	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	94,5	64.14	67.87

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

a) Tingkat layanan rumah tangga Biro Keuangan yang meliputi RKA Biro Keuangan yang tepat waktu, LKIP Biro Keuangan yang tepat waktu, kinerja anggaran Biro
b) Keuangan, persentase pemenuhan dokumen Renstra Biro Keuangan, persentase pencapaian indeks Maturitas SPIP Biro Keuangan dengan bobot total 20%;
c) Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN dengan bobot 5%;
d) Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dengan bobot 5%;
e) Tingkat kehandalan sarana perkantoran dengan bobot 10%;
f) Tingkat Layanan Biro Keuangan berupa Usulan Revisi Anggaran, Pemutakhiran data Aplikasi e-Monitoring dan Reporting, Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan, Laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan), Rencana Bisnis Anggaran Satker BLU, Indikator Kinerja Utama Satker BLU, Proses Penetapan SK KPA dan SK Bendahara Satker yang non ex officio, Usulan Target PNBP dan Pagu Penggunaan, dan Ijin Penggunaan PNBP (hasil dari kuesioner indeks pelayanan Biro Keuangan) dengan bobot 60%.

Terhadap capaian kinerja Triwulan kualitas penyelenggaraan perkantoran sampai dengan Triwulan II dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Capaian TW III	Jumlah
1	Tingkat layanan rumah tangga Biro Keu	20%	100	20
	RKA tepat waktu			
	LKIP tepat waktu			
	Kinerja Anggaran			
	% pemenuhan dokumen Renstra			
	% pencapaian indeks maturitas SPIP			
2	% kesesuaian pencatatan aset BMN	5%	100	5
3	Tingkat pemenuhan sarana perkantoran	5%	100	5
4	Tingkat kehandalan sarana perkantoran	10%	100	10
5	Tingkat pelayanan Biro Keuangan	60%	100	60
	Total	**100%**		**100**

Dari hasil penilaian tersebut diatas, kualitas penyelenggaraan perkantoran s.d posisi Triwulan III sebesar 100.

b. Rencana Tindaklanjut

Akan dilaksanakan pencapaian target program-program kerja Biro Keuangan.

c. Realisasi Anggaran

Tabel 1.16

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Penyelenggaraan Perkantoran	533.481.000	342.181.264	64.14%

7. Sasaran Program: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Keuangan

1) Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan

Tabel 1.17
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Keuangan	Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan	Nilai	70	92.80	132,5

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU
Untuk melihat tingkat profesionalitas setiap pegawai ASN dapat diakses melalui *link https://ip-jasn.bkn.go.id/* (user:NIP, pass: nama depan). Terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti diklat dan belum terdaftar pada SIASN.

b. Rencana Tindaklanjut
Akan segera dilakukan inventarisasi data-data yang belum di update pada aplikasi SIASN dan SIK untuk selanjutnya segera di tindak lanjuti, untuk di proses lanjut melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

c. Realisasi Anggaran

Tabel 1.18

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Monitoring Indeks profesionalisme ASN Biro Keuangan	251,674,000	134.720.000	92.80%

2) Indeks Tata Kelola Menajemen SDM Biro Keuangan

Tabel 1.19
Capaian Kinerja Triwulan III Indeks Tata Kelola Menajemen SDM Biro Keuangan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	2024	REALISASI TW III	KINERJA %
Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Keuangan	Indeks Tata Kelola Menajemen SDM Biro Keuangan	Nilai	70	52,20	74,57

a. Analisis/Evaluasi Capaian IKU

Terhadap capaian kinerja Triwulan kualitas penyelenggaraan perkantoran sampai dengan Triwulan III dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Capaian TW III	Jumlah
1	Tersusunnya dokumen human capital development plan (HCDP)	30%	70	21
2	% kesesuaian formasi ASN dengan dokumen HCDP	25%	100	25
3	% ketepatan waktu kenaikan pangkat / jabatan ASN	15%	100	15
4	% Gaji dan Tunjangan	15%	100	15
5	% Ketepatan waktu perolehan SK Pensiun	15%	100	15
	Total	**100%**		**91**

b. Rencana Tindaklanjut

Telah dilakukan penyusunan dokumen HCDP dan menyesuaikan formasi ASN sesuai dengan dokumen HCDP dimaksud.

c. Realisasi Anggaran

Tabel 1.20

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Tata Kelola Menajemen SDM Biro Keuangan	567.650.000	296,299,000	52,20 %

8. LAPORAN CAPAIAN KINERJA PADA APLIKASI

a. Aplikasi e-Performance Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Kementerian Perhubungan (e-performance.dephub.go.id).

Gambar 2.1
Status Pengumpulan Data Aplikasi e-Peformance Kementerian Perhubungan

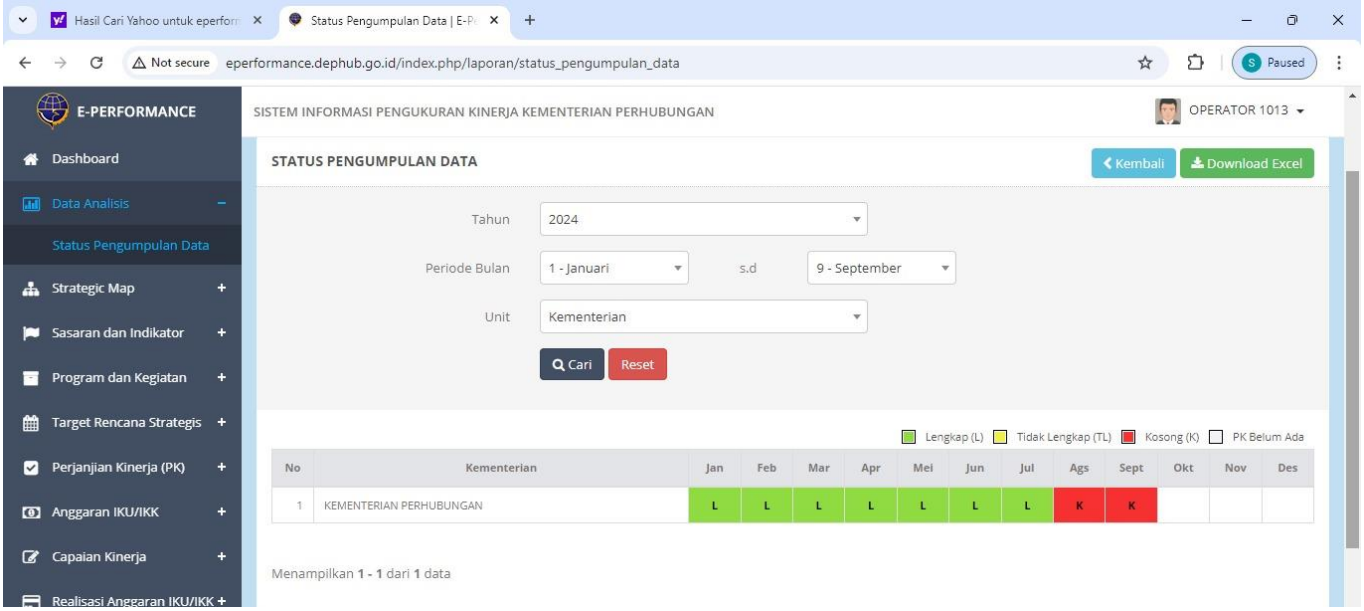

Gambar 2.2
Status Capaian Kinerja Unit Eselon II
Aplikasi e-Peformance Kementerian Perhubungan

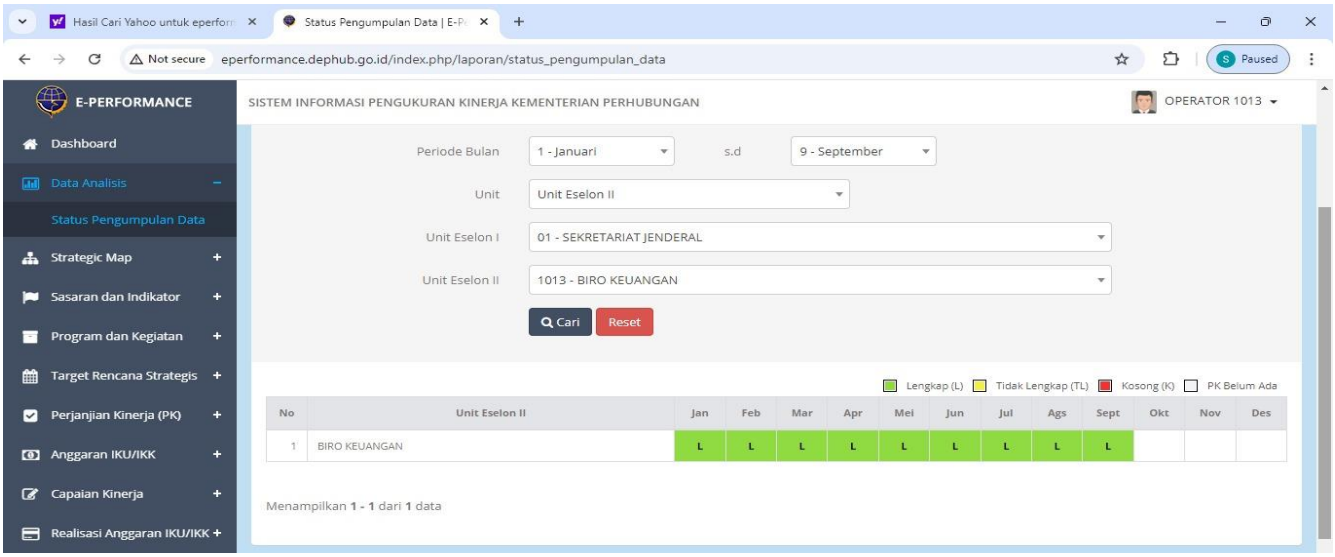

b. Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan (smart.kemenkeu.go.id)

Gambar 2.4
Nilai Kinerja Triwulan III Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

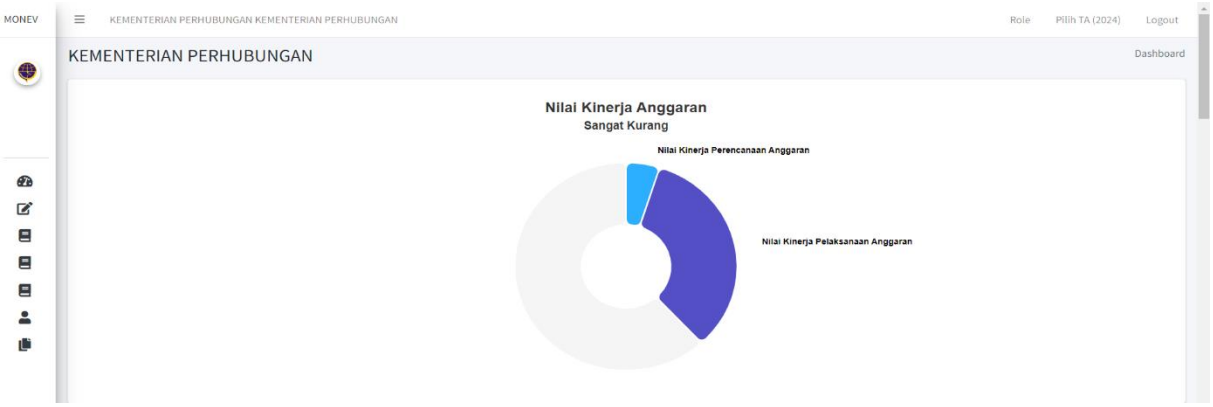

c. Aplikasi Capaian Output dalam Sistem Aplikasi Satker (SAS)

Gambar 2.5
Capaian Output Bulan Juli - September Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO KEUANGAN

REKAP KERTAS KERJA CAPAIAN OUTPUT

periode : AGUSTUS

No	Kanwil DJPB	KPPN	Kode BAES1 Satker	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk/Upload	Jumlah Kiriman Data Sakti	DIPA Revisi Ke (Sakti)	Tanggal Pertama Kirim Sakti	Terakhir Posting OMSPAN	Action	Periode Upload Data
							Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah							
1	K11	133	02201.466348	BIRO KEUANGAN	11	5	5	0	5	100.00	1	11	03-09-2024 14.17.05	03-09-2024 15.00.10	Closed	
Total						5	5	0	5	100.00						

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO KEUANGAN

REKAP KERTAS KERJA CAPAIAN OUTPUT

periode : JULI

No	Kanwil DJPB	KPPN	Kode BAES1 Satker	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk/Upload	Jumlah Kiriman Data Sakti	DIPA Revisi Ke (Sakti)	Tanggal Pertama Kirim Sakti	Terakhir Posting OMSPAN	Action	Periode Upload Data
							Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah							
1	K11	133	02201.466348	BIRO KEUANGAN	11	5	5	0	5	100.00	2	11	02-08-2024 09:17:58	02-08-2024 12:00:07	Closed	
Total						5	5	0	5	100.00						

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO KEUANGAN

REKAP KERTAS KERJA CAPAIAN OUTPUT

periode : SEPTEMBER

No	Kanwil DJPB	KPPN	Kode BAES1 Satker	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk/Upload	Jumlah Kiriman Data Sakti	DIPA Revisi Ke (Sakti)	Tanggal Pertama Kirim Sakti	Terakhir Posting OMSPAN	Action	Periode Upload Data
							Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah							
1	K11	133	02201.466348	BIRO KEUANGAN	11	5	5	0	5	100.00	1	11	01-10-2024 11:45:56	01-10-2024 12:00:07	Open	
Total						5	5	0	5	100.00						

d. Aplikasi Sistem E-Monitoring dan Reporting Kementerian Perhubungan.

Gambar 2.6
Indikator Pelaksanaan Anggaran
Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KL	NAMA KL	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nilai	99.19	83.90	89.86	100.00	99.03	99.27	89.06	92.57	100%	0.00	92.57
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.92	12.59	17.97	10.00	9.90	9.93	22.26				
			Nilai Aspek	91.55		97.04				89.06				

Gambar 2.7
Realisasi Anggaran
Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Unit Eselon I: Seluruh Unit Eselon I | Tahun Anggaran: 2024 | Bulan: Januari s.d Juni | View

Exce

No	Unit/Satker	Pegawai		Barang		Modal		Jumlah		%	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	KEU	Fisik
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp. 155.967.700.000	Rp. 87.863.466.526	Rp. 442.447.092.000	Rp. 172.031.156.141	Rp. 56.380.813.000	Rp. 15.893.879.274	Rp. 654.795.605.000	Rp. 275.788.501.941	42,12%	Rp. 275.788.501.941
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp. 48.178.409.000	Rp. 30.140.130.673	Rp. 59.766.192.000	Rp. 26.565.939.406	Rp. 5.980.221.000	Rp. 1.488.011.052	Rp. 113.924.822.000	Rp. 58.194.081.131	51,08%	Rp. 58.194.081.131
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	Rp. 604.612.828.000	Rp. 387.867.401.691	Rp. 3.854.414.571.000	Rp. 1.262.322.488.734	Rp. 2.231.794.668.000	Rp. 734.671.487.300	Rp. 6.690.822.067.000	Rp. 2.384.861.377.725	35,64%	Rp. 2.384.861.377.725
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Rp. 1.800.298.389.000	Rp. 1.067.112.589.314	Rp. 5.446.721.672.000	Rp. 1.617.583.221.022	Rp. 5.642.195.268.000	Rp. 2.887.887.719.514	Rp. 12.889.215.329.000	Rp. 5.572.583.529.850	43,23%	Rp. 5.572.583.529.850
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	Rp. 958.861.839.000	Rp. 622.820.212.700	Rp. 3.255.083.417.000	Rp. 1.221.977.032.894	Rp. 3.989.573.559.000	Rp. 1.253.369.543.317	Rp. 8.203.518.815.000	Rp. 3.098.166.788.911	37,77%	Rp. 3.098.166.788.911
6	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Rp. 151.273.439.000	Rp. 109.939.096.567	Rp. 3.194.139.090.000	Rp. 356.378.085.074	Rp. 7.611.664.783.000	Rp. 1.228.212.816.459	Rp. 10.957.077.312.000	Rp. 1.694.529.998.100	15,47%	Rp. 1.694.529.998.100
7	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Rp. 46.758.254.000	Rp. 24.491.964.800	Rp. 143.537.606.000	Rp. 51.906.380.083	Rp. 6.161.480.000	Rp. 3.778.116.260	Rp. 196.457.340.000	Rp. 80.176.461.143	40,81%	Rp. 80.176.461.143
8	BADAN PENGEMBANGAN SDM	Rp. 349.277.066.000	Rp. 205.744.035.242	Rp. 2.667.710.658.000	Rp. 1.079.499.737.361	Rp. 701.437.156.000	Rp. 157.653.103.627	Rp. 3.718.424.880.000	Rp. 1.442.896.876.230	38,8%	Rp. 1.442.896.876.230
9	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	Rp. 35.904.792.000	Rp. 23.420.130.972	Rp. 223.365.007.000	Rp. 87.682.496.285	Rp. 70.904.212.000	Rp. 21.826.134.149	Rp. 330.174.011.000	Rp. 132.928.761.406	40,26%	Rp. 132.928.761.406
	Total	Rp. 4.151.132.716.000	Rp. 2.559.399.028.485	Rp. 19.287.185.305.000	Rp. 5.875.946.537.000	Rp. 20.316.092.160.000	Rp. 6.304.780.810.952	Rp. 43.754.410.181.000	Rp. 14.740.126.376.437	33,69%	

e. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Perhubungan

Gambar 2.8
Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11x berturut-turut

BAB IIII
PENUTUP

Biro Keuangan yang didukung oleh 59 (lima puluh sembilan) SDM dengan anggaran Rp.18,562,099,000,- melaksanakan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Keluaran Utama.

Total daya serap anggaran Biro Keuangan pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp14,175,628,430,- atau 76.37%.

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2024

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

KONTRIBUSI BIRO KEUANGAN PADA LEVEL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
SS 1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel	IKU	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2	74,66	82,75 %	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	2.900.310.000	2.007.919.167	69,23

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

KONTRIBUSI BIRO KEUANGAN PADA LEVEL BIRO KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KELUARAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel	IKK 1.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,2	74,66	82,75 %	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	2.900.310.000	2.007.919.167	69,23
SK 2	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan	IKK 2.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	-	Pengelolaan Laporan Keuangan	1.656.901.000	940.835.676	56.78
SK 3	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKK 3.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan bidang Keuangan	Nilai	74	26,5	35,81	Kualitas dan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	7.158.506.000	1.981.303.908	27,68
		IKK 3.2	Indeks Kualitas Kebijakan bidang Keuangan	Nilai	72	17,35	24,09	Kebijakan Bidang Keuangan	299,350,000	72,129,781	17,35

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KELUARAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
SK 4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	IKK 4.1	Kualitas Pengelolaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	48,94	57,84	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan	-	-	-
SK 5	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	IKK 5.1	Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Nilai	90	41,02	59,21	PIPK	569.817.000	436,070,546	76,53
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Biro Keuangan	IKK 6.1	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	94,5	41,02	43,40	Penyelenggaraan Perkantoran	533.481.000	342.181.264	64.14
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Keuangan	IKK 7.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan	Nilai	70	50,67	72,38	Monitoring Indeks profesionalisme ASN	251,674,000	134.720.000	92,80
		IKK 7.2	Indeks Tata Kelola Manajemen SDM Biro Keuangan	Nilai	70	52,20	74,57	Tata Kelola Menajemen SDM	567,650,000	296,299,000	52,20